

Dynamics of access and utilization of information on urban waste management by the community in Banjarmasin City

Dinamika akses dan pemanfaatan informasi tentang pengelolaan sampah perkotaan oleh masyarakat di Kota Banjarmasin

Najmi Fuady¹, Muhammad Iqbal, Sarifah Nur Isra Jairina, Mina Azahra, Annisa Aulia Nur

¹Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan

¹Jalan A. Yani KM. 12.500, Kalimantan Selatan

Article Info

Corresponding Author:

Najmi Fuady

✉ najmifuady@gmail.com

History:

Submitted: 18-09-2025

Revised: 09-02-2026

Accepted: 16-03-2026

Keyword:

Banjarmasin city; community participation; information access; information openness; waste management

Kata kunci:

akses informasi; keterbukaan informasi; Kota Banjarmasin; partisipasi masyarakat; pengelolaan sampah

Abstract

Introduction. The closure of the Basirih landfill led to waste accumulation and the emergence of illegal dumpsites across Banjarmasin, where limited public access to policy information hindered effective waste management. This study examined how urban residents accessed information on waste management policy and how openness to information shaped behavioral change.

Research Methods. A qualitative exploratory case study was employed, involving 15 informants from five affected districts.

Data Analysis. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and then analyzed thematically using the *information grounds* (IG) and *diffusion of innovations* (DOI) frameworks.

Results. Findings showed that residents accessed information predominantly through informal spaces rather than formal channels such as village office briefings or neighborhood meetings. Information openness influenced behavioral change when messages were delivered by credible sources, easy to understand, and reinforced by visible local examples. Behavioral change remained constrained by the absence of technical guidance, digital literacy gaps, and limited infrastructure.

Conclusion. In a waste management crisis, informal channels functioned as the primary information infrastructure through which formal policy was validated. The effectiveness of behavioral innovation diffusion depended on information openness and trust in local sources, not on the intensity of formal government outreach alone.

Abstrak

Pendahuluan. Penutupan TPA Basirih memicu penumpukan sampah dan munculnya TPS ilegal di Kota Banjarmasin. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi kebijakan menjadi salah satu faktor penghambat efektivitas pengelolaan sampah. Penelitian ini menganalisis bagaimana masyarakat mengakses informasi kebijakan pengelolaan sampah dan bagaimana keterbukaan informasi memengaruhi perubahan perilaku warga.

Metode penelitian. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif, melibatkan 15 informan dari lima kecamatan terdampak.

Data analisis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik menggunakan kerangka *information grounds* (IG) dan *diffusion of innovations* (DOI).

Hasil. Temuan menunjukkan bahwa warga mengakses informasi lebih banyak melalui ruang informal dibanding saluran formal seperti sosialisasi kelurahan atau rapat RT. Keterbukaan informasi memengaruhi perubahan perilaku ketika pesan disampaikan oleh sumber yang kredibel, mudah dipahami, dan diperkuat oleh contoh nyata di lingkungan. Namun, perubahan perilaku masih terhambat oleh minimnya arahan teknis, kesenjangan literasi digital, dan keterbatasan sarana pendukung.

Kesimpulan. Dalam situasi krisis pengelolaan sampah, saluran informal menjadi infrastruktur informasi utama yang memvalidasi kebijakan formal. Efektivitas difusi inovasi perilaku bergantung pada keterbukaan informasi dan kepercayaan terhadap sumber di ruang-ruang sosial tersebut, bukan pada intensitas sosialisasi formal semata.



Copyright © 2025 by
Berkala Ilmu Perpustakaan
dan Informasi

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the UGM Library and Archives.

 <https://doi.org/10.22146/bip.v22i1.24687>

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan populasi dan perubahan pola konsumsi telah menempatkan pengelolaan sampah perkotaan sebagai krisis global. Proyeksi The World Bank (2018) menunjukkan produksi sampah dunia akan menyentuh angka 3,4 miliar ton pada 2050, di mana wilayah urban menjadi penyumbang utama. Indonesia sendiri masih bergelut dengan efektivitas pengelolaan di mana data SIPSN KLHK (2024) mencatat sekitar 40,18% dari 33,86 juta ton sampah tahunan belum tertangani dengan optimal dan berakhir mencemari lingkungan. Kota Banjarmasin di tingkat lokal menghadapi titik kritis pasca-penutupan TPA Basirih pada akhir 2024. Kebijakan ini memicu peningkatan titik pembuangan sampah (TPS) ilegal dan tumpukan sampah di berbagai sudut kota karena sistem transisi yang belum sepenuhnya mapan (Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, 2025).

Kegagalan pengelolaan ini sering kali berakar pada minimnya akses masyarakat terhadap informasi kebijakan. Ketika informasi tidak tersampaikan dengan jelas, pengetahuan praktis warga mengenai tata cara pengelolaan sampah menjadi rendah, yang pada gilirannya melumpuhkan partisipasi mereka (Etim et al., 2024). Sosialisasi yang lemah terbukti di beberapa daerah seperti Pekanbaru dan Dumai, berkontribusi langsung pada ketidakpatuhan warga terhadap regulasi (Handayani & Andriyus, 2024; Rusadi & Setiawan, 2022). Fenomena serupa terlihat nyata di Banjarmasin di mana warga mengalami kebingungan menghadapi sistem baru pasca-penutupan TPA. Temuan awal di lapangan pada Februari 2025 menunjukkan bahwa instruksi mengenai pemilahan sampah dari rumah dan penghentian sementara pengangkutan tidak terserap dengan baik oleh masyarakat. Hal ini lantas menciptakan ketimpangan distribusi informasi yang memperburuk keadaan (Shekhar et al., 2023).

Diskursus mengenai pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Indonesia selama ini cenderung terbelah dalam dua arus

utama. Di satu sisi, terdapat fokus pada efisiensi teknis-manajerial melalui digitalisasi dan teknologi seperti GIS atau IoT (Maulana et al., 2025). Di sisi lain, pendekatan partisipatif-normatif lebih menekankan pada nilai-nilai edukasi 3R dan budaya gotong royong (Nurmasari et al., 2025). Namun, kedua perspektif ini sering kali mengasumsikan informasi sebagai elemen yang sudah tersedia (*given*). Masih sedikit penelitian yang membedah bagaimana informasi sebenarnya bergerak dan dimaknai dalam ruang-ruang informal seperti percakapan di warung kopi, pasar, masjid, hingga interaksi di media sosial dan bagaimana ruang-ruang tersebut membentuk kepatuhan atau justru resistensi warga.

Penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana masyarakat urban di Banjarmasin mengakses dan menggunakan informasi kebijakan sampah dalam keseharian mereka. Fokus utamanya adalah memetakan saluran akses informasi serta melihat sejauh mana keterbukaan informasi tersebut mampu mengubah perilaku nyata di lapangan.

Analisis dilakukan melalui dua kerangka teori utama: *information grounds* dan *diffusion of innovations*. Teori *information grounds* digunakan untuk melacak bagaimana pertukaran informasi terjadi secara organik di ruang sosial informal (Fisher & Naumer, 2006). Sementara itu, *diffusion of innovations* membantu menganalisis proses adopsi perilaku baru, mulai dari tahap penerimaan informasi hingga praktik pengelolaan sampah yang konsisten (Rogers, 1983).

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya bergantung pada saluran formal pemerintah, tetapi sangat dipengaruhi oleh dinamika jaringan sosial dan literasi lokal. Secara praktis, studi ini bermaksud menawarkan model strategi komunikasi yang lebih membumi dan partisipatif, yang mampu menjembatani jarak antara regulasi publik dan realitas kehidupan warga di tingkat akar rumput.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan literatur terdahulu

Pelibatan ibu rumah tangga dan kader lokal di Yogyakarta melalui metode *participatory action research* (PAR) terbukti efektif menekan volume sampah rumah tangga (Mulasari et al., 2024). Melalui siklus aksi yang edukatif, partisipasi warga berhasil dibangun secara sistematis guna meningkatkan sanitasi lingkungan. Meski demikian, studi ini cenderung memosisikan informasi sebatas instruksi teknis dari fasilitator kepada warga. Belum terlihat bagaimana masyarakat mengakses informasi awal secara mandiri atau bagaimana pesan-pesan tersebut diolah kembali dalam ruang interaksi sosial di luar forum resmi pelatihan. Informasi dalam konteks ini masih dipandang sebagai materi statis, bukan sebagai entitas yang hidup dalam percakapan sehari-hari.

Strategi difusi kesadaran di Lagos, Nigeria, menonjolkan peran aktor utama seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat (Etim et al., 2024). Fokus kajiannya terletak pada pentingnya segmentasi audiens untuk menjangkau kelompok sosial yang berbeda melalui media yang tepat. Pendekatan ini masih bersifat aturan dari pihak atasan (*top-down*) dan luput memperhitungkan jalur komunikasi informal yang organik di tengah warga. Aspek literasi informasi serta bagaimana warga memaknai kebijakan pemerintah belum menjadi sorotan utama, padahal variabel ini sangat menentukan keberhasilan adopsi praktik pengelolaan sampah di lapangan.

Keberhasilan inisiatif *swachh badi* di Siddipet, India, memperlihatkan kuatnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi perempuan dalam mengubah perilaku masyarakat (Sultana, 2023). Kampanye intensif yang mencakup kunjungan rumah hingga platform digital terbukti mampu mendorong pengembangan ekonomi sirkular berbasis kompos. Model komunikasi yang digunakan tetap berpusat pada penyuluhan yang terkendali dari atas. Dinamika harian warga, termasuk bagaimana kepercayaan sosial dan hubungan antarwarga membentuk penerimaan terhadap informasi, belum terjelaskan secara mendalam.

Ketiga studi tersebut menyumbang pemahaman penting tentang partisipasi warga dan peran komunikasi dalam pengelolaan sampah. Kesamaan dari ketiganya adalah absennya pembahasan mendalam tentang akses, distribusi, dan makna sosial dari informasi. Informasi cenderung diperlakukan sebagai konten yang disampaikan melalui pelatihan atau media kampanye, bukan sebagai proses sosial yang berlangsung dalam konteks hubungan sosial sehari-hari. Kajian masih terbatas tentang bagaimana warga di ruang urban yang beragam secara sosial, seperti Kota Banjarmasin, memperoleh informasi secara informal, mendiskusikannya, menyaringnya berdasarkan kepercayaan dan pengalaman, lalu menjadikannya sebagai dasar untuk bertindak.

2. Tinjauan teori

Information grounds berangkat dari gagasan bahwa informasi tidak hanya diperoleh melalui saluran formal meliputi surat resmi (surat dinas), memo, laporan kinerja, siaran pers, rapat resmi, peraturan perundang-undangan, situs web resmi pemerintah, dan media sosial resmi instansi, tetapi justru banyak beredar dan dipertukarkan di ruang-ruang sosial informal yang bersifat insidental (Fisher & Naumer, 2006; Khoir, et al., 2015). Dalam konteks ini, tempat-tempat seperti pasar, warung kopi, toko kelontong, jalan-jalan di lingkungan RT, pelataran rumah warga, masjid hingga media sosial warga menjadi arena penting bagi sirkulasi informasi.

Studi oleh Cisek memperkuat bahwa tempat-tempat ini bukan sekadar lokasi fisik, tetapi juga ruang simbolik yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial bermakna dan pembentukan makna bersama terhadap informasi yang diperoleh (Cisek et al., 2018; Khoir, et al., 2015)). Bahkan bentuk komunikasi yang tampak ringan seperti obrolan santai atau cerita sehari-hari dapat menjadi medium penting dalam menyebarkan informasi kebijakan dan membentuk sikap warga.

Dalam perkembangannya, teori *information grounds* tidak hanya terbatas

pada ruang fisik, melainkan juga telah diperluas ke ruang digital (Boltuc, 2022). Platform seperti *facebook*, *twitter*, dan *whatsapp*, terutama dalam konteks lokal, memainkan peran sebagai ruang pertemuan virtual yang tidak hanya memfasilitasi pertukaran informasi, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga. Dalam konteks Kota Banjarmasin, keberadaan grup-grup daring warga menjadi penting sebagai sarana informasi alternatif, terutama ketika saluran resmi pemerintah belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif.

Sementara itu, *diffusion of innovations* dari Rogers memberikan kerangka untuk memahami bagaimana informasi yang telah diperoleh dan dimaknai kemudian memengaruhi keputusan individu atau kelompok dalam mengadopsi praktik atau kebiasaan baru (M. Rogers, 1983). Rogers mengemukakan bahwa proses difusi inovasi terjadi melalui lima tahap utama: pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Teori ini menjelaskan bahwa adopsi tidak terjadi secara seragam, melainkan melalui proses bertahap yang sangat dipengaruhi oleh karakteristik inovasi itu sendiri, seperti keunggulan relatif, kompatibilitas dengan nilai dan pengalaman sebelumnya, praktik yang mudah, *trialability* (dapat dicoba), dan *observability* (dapat diamati hasilnya).

Penelitian Chen (2024) menunjukkan bahwa peran aktor seperti *early adopters* sangat menentukan dalam mempercepat penerimaan inovasi dalam suatu komunitas. Mereka bertindak sebagai jembatan antara kebijakan dan masyarakat luas melalui jaringan sosial yang mereka miliki. Ini sejalan dengan penegasan Rogers bahwa komunikasi interpersonal memainkan peran yang lebih kuat daripada saluran formal dalam tahap-tahap awal adopsi.

Dalam penguatan teoretis yang lebih luas, Guo & Huang (2024) menekankan bahwa difusi inovasi tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik teknologi atau ide yang diadopsi, tetapi juga sangat bergantung pada struktur sosial, budaya komunitas, serta keberadaan opini publik yang memiliki

otoritas informal dalam masyarakat. Mereka juga menyoroti pentingnya integrasi teori ini ke dalam berbagai bidang termasuk pertanian, kesehatan, dan pendidikan, yang secara implisit membuka ruang untuk penerapan dalam konteks pengelolaan lingkungan di kawasan urban.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal untuk mengeksplorasi secara mendalam dinamika pertukaran informasi dan adopsi perilaku masyarakat di tengah krisis pengelolaan sampah pasca-penutupan TPA Basirih (Tomaszewski et al., 2020). Pendekatan ini dipilih karena dianggap mampu menangkap realitas subjektif dan kompleksitas interaksi sosial yang tidak dapat diukur sekadar dengan angka. Kerangka teoritis *information grounds* (Fisher & Naumer, 2006) dan *diffusion of innovations* (M. Rogers, 1983) digunakan sebagai panduan utama dalam penyusunan instrumen dan analisis data.

Information grounds digunakan karena dianggap mampu menjelaskan bagaimana dan di mana warga memperoleh serta bertukar informasi dalam konteks sosial keseharian, baik secara langsung (luring) maupun melalui media sosial. Sementara itu, teori *diffusion of innovations* digunakan untuk menganalisis bagaimana informasi yang beredar tersebut direspons dan diinternalisasi oleh warga menjadi keputusan dan tindakan dalam pengelolaan sampah.

Penelitian dilakukan di lima kecamatan di Kota Banjarmasin (Selatan, Utara, Timur, Tengah, dan Barat) yang terdampak langsung oleh perubahan skema pengelolaan sampah. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria : (1) warga yang berdomisili tetap minimal 2 tahun di wilayah terdampak (memahami konteks sebelum dan sesudah krisis); (2) terlibat aktif dalam jejaring sosial warga baik luring maupun daring; dan (3) bersedia berbagi pengalaman terkait praktik pengelolaan sampah. Berdasarkan kriteria tersebut, maka ditentukanlah jumlah informan sebanyak 15 orang. Jumlah ini

dipilih karena kriteria saturasi dianggap tercapai ketika wawancara selanjutnya tidak lagi memunculkan kode atau tema baru yang signifikan, dan informasi yang diperoleh mulai mengalami repetisi (Abdussamad, 2021). Informan terdiri dari warga, ketua RT, pengurus LPMK, dan kader kelurahan untuk memastikan perspektif yang muncul bervariasi sehingga diharapkan dapat memperkaya data. Objek penelitian adalah praktik komunikasi dan perilaku informasi masyarakat terkait pengelolaan sampah.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam semi-terstruktur untuk menggali pengalaman informan terkait sumber informasi, makna yang dikonstruksi, dan respons perilaku. Pedoman wawancara disusun secara deduktif berdasarkan dimensi teori. Pertanyaan terkait lokasi dan situasi sosial diturunkan dari teori *information grounds*, sedangkan pertanyaan mengenai tahapan adopsi perilaku diturunkan dari teori *diffusion of innovations*. Kedua, observasi terbatas di ruang-ruang interaksi sosial seperti warung kopi, tempat ibadah, halaman kelurahan, rumah-rumah warga, kegiatan bank sampah, dan media sosial warga untuk mengamati praktik penyebaran informasi secara langsung. Fokus observasi adalah memetakan pola interaksi seperti siapa aktor dominan yang berbicara, dan bagaimana informasi sampah divalidasi dalam obrolan informal tersebut. Ketiga, analisis dilakukan terhadap dokumen kebijakan, meliputi surat edaran kelurahan, spanduk himbauan, serta tangkapan layar percakapan di media sosial warga untuk melihat narasi yang berkembang secara *real-time*.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik reflektif. Transkrip wawancara dan catatan observasi dikode secara manual, kemudian dikategorikan ke dalam tema yang dikembangkan secara induktif dan diarahkan oleh kerangka teori. Validitas dijaga melalui triangulasi data, *member checking* (konfirmasi kepada informan), dan refleksi peneliti terhadap bias personal (Mekarisce, 2020).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akses informasi kebijakan pengelolaan sampah oleh masyarakat perkotaan di Banjarmasin

Berdasarkan narasi yang muncul dalam wawancara, warga mengakses informasi mengenai penutupan TPA Basirih dan kebijakan pengelolaan sampah melalui saluran yang beragam. Salah seorang warga, misalnya, menyebutkan bahwa ia mengetahui informasi tersebut dari edaran resmi Pemerintah Kota dan media sosial. Ia menuturkan,

“Setelah TPA Basirih ditutup itu pemerintah Kota Banjarmasin kan mengeluarkan edaran ‘bagaimana cara pengelolaan sampah bagi masyarakat’ ... nah untuk mengetahui itu dari Pemerintah dan dari Media Sosial.” (Adi).

Pengalaman informan lain bernama Jumi mengungkap pola yang berbeda. Jumi tidak terpapar algoritma media sosial pemerintah, ia justru pertama kali mendengar regulasi penutupan TPA dari percakapan lisan di lingkungan sosialnya. Perbedaan ini menggambarkan bahwa akses informasi warga tidak seragam, melainkan terdistribusi melalui bauran saluran formal dan informal. Surat edaran pemerintah dan media sosial institusi berfungsi sebagai pemicu awal yang memperkenalkan kebijakan baru, sementara percakapan antartetangga atau interaksi lisan di kantor kelurahan menentukan kecepatan penyebaran isu sekaligus kedalaman pemahaman teknis warga.

Pola terbaginya saluran informasi ini memiliki titik singgung dengan temuan studi pengelolaan limbah di Republik Ceko. Dalam riset berskala nasional yang melibatkan 1.050 responden, para peneliti menginvestigasi peran berbagai saluran komunikasi dalam mendorong praktik manajemen limbah kayu yang sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular dan bioekonomi. Dengan model regresi *ordinary least squares* (OLS), studi tersebut mengevaluasi dampak paparan media konvensional dibandingkan media digital terhadap skor keterlibatan

warga dalam pengelolaan limbah kayu (Emirzade & Huseyinoglu, 2025).

Data dari penelitian itu menunjukkan sebuah paradoks. Di tengah digitalisasi, televisi sebagai media penyiaran satu arah justru tetap menjadi sumber yang berpengaruh dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat terhadap praktik tata kelola limbah. Sebaliknya, portal berita daring dan media sosial belum menunjukkan pengaruh kuat sebagai penentu perubahan perilaku warga terhadap lingkungan.

Jika dianalisis melalui lensa *diffusion of innovation*, paradoks tersebut menunjukkan bahwa adopsi perilaku memilah dan mengelola sampah sangat bergantung pada observabilitas pesan dan kesesuaiannya dengan norma lokal. Televisi di Ceko mewarisi otoritas historis dari era pasca-sosialis yang sentralistik, sehingga informasi yang ditayangkannya dipersepsikan lebih legitimat dan kredibel. Platform digital, di sisi lain, cenderung dikonsumsi secara pasif di mana pengguna menggulir layar tanpa benar-benar mencerna substansinya.

Temuan ini relevan untuk membaca pola kepercayaan warga di Banjarmasin. Mia menyandarkan kepercayaannya pada saluran pemerintah; baginya, stempel institusi atau logo resmi pemerintah daerah adalah jaminan kepastian hukum yang sulit dinegosiasikan. Sebaliknya, warga lain justru menilai informasi yang bersirkulasi antarwarga memiliki derajat kredibilitas lebih tinggi daripada pernyataan otoritas. Ia menuturkan,

"Kalau menurut saya, itu justru dari masyarakat langsung... informasi yang datang langsung dari masyarakat biasanya lebih bisa dipercaya." (Herman).

Perbedaan ini menunjukkan bahwa legitimasi sebuah informasi di mata warga sangat bergantung pada konstruksi pengalaman personal mereka. Bagi sebagian orang, birokrasi adalah representasi kebenaran yang sah namun bagi sebagian lain, percakapan tatap muka dengan tetangga dipersepsikan lebih jujur dan dapat diandalkan.

Selain menelusuri saluran pemicu, pemetaan saluran yang lekat dengan keseharian warga menunjukkan bahwa aktivitas di ranah digital sering kali berkelindan dengan interaksi di ruang fisik. Herly dan Rahmat mengungkapkan bahwa media sosial menjadi salah satu saluran yang intens mereka gunakan, namun hal itu diikuti oleh kegiatan sosialisasi tatap muka. Herly menjelaskan bahwa paparan awal sering kali dimulai dari media sosial pemerintah, tetapi mereka juga menghadiri undangan sosialisasi luring dari Dinas Lingkungan Hidup dan menerima informasi dari pemimpin lokal seperti Pak Lurah dan Pak RT yang disampaikan dari mulut ke mulut. Dari pemetaan ini, media sosial tampak berfungsi sebagai sumber informasi awal bagi sebagian warga, sementara ruang fisik menjadi tempat informasi itu dikonfirmasi dan diperkuat.

Isu sampah juga hidup dalam percakapan warga di berbagai konteks. Ridha menceritakan topik ini sering muncul saat kumpul-kumpul warga, sementara Rahmadi menyoroti adanya sosialisasi aktif. Di ranah digital, Mia menyebutkan grup WhatsApp di lingkungannya cukup aktif membahas isu ini. Berbeda dengan itu, Junai menyatakan bahwa grup WhatsApp RT di lingkungannya ada, tetapi tidak berfungsi optimal. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keberadaan infrastruktur digital tidak dengan sendirinya menjamin pertukaran informasi yang efektif. Di beberapa komunitas saluran ini menjadi ruang diskusi aktif, di komunitas lain hanya berfungsi sebagai formalitas administratif.

Temuan lapangan ini mengindikasikan bahwa aliran informasi mengenai pengelolaan sampah di Banjarmasin tidak bergerak secara linear, melainkan menyerupai jaring-jaring interaksi antara ruang digital dan fisik. Fenomena ini dapat dibaca melalui rekonseptualisasi *Sense of Place* (SoP) yang diajukan Erfani (2022). Erfani berargumen bahwa *Sense of Place* bukan atribut statis suatu lokasi, melainkan entitas dinamis yang lahir dari interrelasi antara tiga komponen: individu, komunitas, dan tempat. Dalam konteks warga Banjarmasin, "tempat" tidak lagi hanya

Dinamika akses dan pemanfaatan informasi tentang pengelolaan sampah perkotaan oleh masyarakat di Kota Banjarmasin

bermakna geografis, tetapi telah meluas mencakup ruang digital seperti grup WhatsApp dan media sosial.

Pola di mana media sosial berperan sebagai sumber informasi awal sementara ruang fisik mengonfirmasinya sejalan dengan konsep *interactions in-between* dari Erfani bahwa identitas dan kelekatan terhadap suatu tempat sering kali dinegosiasikan melalui memori kolektif dan aktivitas rutin. Paparan informasi melalui media sosial yang kemudian dikonfirmasi dalam pertemuan tatap muka, seperti undangan dari dinas terkait atau instruksi ketua RT, mencerminkan bagaimana individu membangun *place satisfaction* melalui konsistensi informasi. Ruang fisik dalam hal ini berfungsi sebagai jangkar yang memberikan validasi sosial terhadap narasi digital.

Namun, efektivitas infrastruktur digital ini tidak seragam di semua lingkungan, sebagaimana terlihat dari perbedaan fungsi grup WhatsApp antarkomunitas. Erfani menjelaskan bahwa hubungan antara komunitas dan tempat dipengaruhi oleh dinamika internal kelompok. Minimnya diskusi aktif di media sosial pada kelompok tertentu dapat ditafsirkan sebagai rendahnya keterhubungan fungsional antara komunitas dan ruang digitalnya. Tanpa keterikatan emosional atau makna kolektif yang cukup kuat, infrastruktur digital hanya akan menjadi formalitas administratif. Sebaliknya, pada komunitas yang memiliki keterikatan kuat, ruang digital berpeluang menjadi ekstensi dari identitas tempat mereka, di mana isu sampah dibahas secara organik sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

Keterlibatan figur lokal, dari Ketua RT hingga petugas gerobak sampah, sebagai perantara informasi (*information intermediaries*) menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Banjarmasin dipengaruhi oleh apa yang disebut Dral et al. (2023) sebagai *legitimasi throughput*. Proses penyampaian informasi dalam konteks ini bukan sekadar transmisi data teknis, melainkan interaksi yang kualitasnya ditentukan oleh transparansi dan kepercayaan prosedural. Pernyataan Mia

bahwa "jabatan saja tidak cukup" sejalan dengan argumen Dral et al. (2023) bahwa legitimasi tidak otomatis melekat pada institusi formal, melainkan perlu dinegosiasikan melalui kualitas hubungan antara pembawa pesan dan masyarakat. Ketika warga lebih mempercayai figur yang memiliki kedekatan personal, hal itu merupakan bentuk validasi bahwa proses komunikasi dianggap adil dan dapat diterima secara sosial (*throughput legitimacy*).

Namun, dinamika lapangan juga mengisyaratkan ketegangan antara berbagai dimensi legitimasi, sebuah dilema yang diidentifikasi Dral et al. (2023). Figur lokal memberikan kedekatan dan aksesibilitas, tetapi di sisi lain muncul kebutuhan akan legitimasi *input* yang berbasis kompetensi. Keinginan Mia agar sosialisasi disampaikan langsung oleh orang yang memang ahli mencerminkan ekspektasi sebagian warga terhadap kualitas aktor yang terlibat dalam perencanaan. Dral et al. (2023) menjelaskan bahwa legitimasi *input* berkaitan dengan persepsi mengenai siapa yang dianggap berhak berbicara dan sejauh mana mereka merepresentasikan kepentingan publik. Ketika warga meragukan pesan berantai dan mengharapkan kehadiran ahli, *throughput legitimacy* belum memadai tanpa kepastian teknis yang menjamin efektivitas kebijakan.

Ketegangan ini berkaitan langsung dengan *output* yakni sejauh mana informasi mampu memotivasi warga untuk mengubah perilaku mereka. Dral et al. (2023) mencatat bahwa proses partisipatif berisiko gagal jika tidak menghasilkan luaran yang efektif. Aspirasi warga untuk mendapatkan informasi dari pakar menunjukkan bahwa motivasi mereka dipengaruhi oleh persepsi terhadap hasil akhir: apakah cara ini dapat menyelesaikan masalah sampah? Jika informasi hanya berputar di level figur lokal tanpa penguatan dari otoritas ahli, warga berpotensi memandangi proses tersebut sebagai formalitas administratif tanpa dampak nyata.

Fenomena *information overload* dan kesenjangan literasi digital dalam penyebaran informasi pengelolaan sampah di Banjarmasin dapat dibaca melalui model

difusi kebijakan Kuhlmann et al. (2020). Kuhlmann menekankan bahwa agar informasi kebijakan diadopsi dengan baik, ia perlu melewati tahap persepsi dan translasi. Kasus Zainal yang mengabaikan informasi akibat banyaknya pesan masuk merupakan hambatan pada tahap persepsi. Dalam kerangka Kuhlmann, difusi tidak terjadi otomatis di mana penerima pesan tidak mampu mempersepsikannya sebagai sesuatu yang relevan akibat tumpukan informasi, perjalanan informasi kebijakan itu bisa terhenti sebelum proses pemaknaan dimulai.

Hambatan yang dihadapi Wahab terkait kesenjangan literasi antargenerasi mencerminkan tantangan pada tahap translasi. Kuhlmann berpendapat bahwa informasi kebijakan dari luar perlu diterjemahkan ke dalam konteks dan kapasitas lokal agar dapat dipahami. Ketika warga yang tidak terbiasa dengan teknologi menerima pesan digital tanpa pendampingan, proses translasi ini menghadapi hambatan kognitif di mana informasi mungkin sampai secara teknis, tetapi tidak bertransformasi menjadi pengetahuan yang mendorong tindakan. Tanpa kurasi, saluran digital berpotensi kurang efektif dalam memfasilitasi adopsi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat akar rumput.

Kuhlmann juga menawarkan konsep *micro-level promoters* yang terdiri dari aspek manusia, sumber daya, dan prosedur. Temuan lapangan mengenai saluran digital yang hanya berfungsi sebagai papan pengumuman satu arah selaras dengan kritik Kuhlmann terhadap fokus berlebihan pada aspek prosedural yang dalam hal ini infrastruktur digital dengan mengabaikan aspek manusia. Agar difusi informasi pengelolaan sampah berjalan efektif, teknologi perlu didukung oleh aktor manusia yang aktif mengurus dan mendampingi warga menavigasi arus informasi. Tanpa mediator manusia, sumber daya digital yang memadai sekalipun sulit menggerakkan perubahan sosial di tengah keterbatasan literasi dan perhatian warga.

Aspek *framing* juga tidak kalah penting. Anggapan bahwa membayar iuran membebaskan warga dari kewajiban

memilah sampah membuat informasi pemilahan dianggap tidak relevan. Hambatan ini, sebagaimana diungkapkan Rahmadi, dapat dianalisis melalui teori kohesi sosial Bruggeman (2024). Bruggeman berargumen bahwa fenomena seperti pembentukan konsensus dan memori kolektif sangat dipengaruhi oleh konektivitas aljabar dalam jaringan sosial. Anggapan bahwa iuran sampah membebaskan dari kewajiban memilah bukan sekadar opini individu melainkan telah menjadi konsensus kolektif yang mencapai titik jenuh dalam jaringan sosial warga.

Bruggeman (2024) menjelaskan bahwa dalam kelompok dengan kohesi sosial tinggi, konsensus terbentuk lebih cepat karena adanya redundansi informasi. Narasi bahwa warga cukup membuang sampah tanpa memilah telah menjadi bagian dari memori kolektif yang diperkuat melalui interaksi sehari-hari. Dalam model Bruggeman, kelompok dengan jaringan yang rapat cenderung saling mengoreksi untuk mempertahankan norma yang ada. Pola pikir praktis ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial di mana warga merasa tindakan mereka adalah hal yang wajar karena didukung oleh pemahaman serupa dari lingkaran sosial mereka.

Ruang informal turut membentuk *frame* apakah sebuah kebijakan dianggap masuk akal, selaras dengan temuan Bruggeman (2024) mengenai bagaimana kohesi sosial melindungi kelompok dari interferensi informasi baru. Kebijakan pemilahan sampah dari pemerintah masuk sebagai "informasi interferensi" yang mencoba mengubah perilaku yang sudah mapan. Karena jaringan sosial warga di ruang informal memiliki konektivitas yang kuat, informasi baru itu sering dikesampingkan demi mempertahankan konsensus lama yang dianggap lebih menguntungkan secara praktis. Semakin kohesif sebuah kelompok, semakin tahan mereka terhadap perubahan eksternal yang dianggap mengganggu stabilitas kolektif.

Kebutuhan akan *frame* yang menyentuh nilai lokal seperti manfaat ekonomi atau kenyamanan, merupakan upaya menciptakan

Dinamika akses dan pemanfaatan informasi tentang pengelolaan sampah perkotaan oleh masyarakat di Kota Banjarmasin

sinkronisasi sosial baru. Bruggeman (2024) menekankan bahwa pembelajaran kolektif bergantung pada seberapa baik jaringan sosial terintegrasi. Tanpa narasi yang mampu mengubah cara warga memandang keuntungan kolektif, informasi pemilahan sampah hanya akan berhenti sebagai pengetahuan pasif. Untuk memecahkan kebuntuan ini, kebijakan perlu masuk ke dalam saluran redundansi di ruang informal dan menawarkan konsensus baru yang dianggap lebih bermanfaat. Hambatan yang dialami Rahmadi dan warga lainnya bukan semata masalah kognisi individu, melainkan produk dari struktur jaringan sosial yang mengunci warga dalam satu persepsi kolektif. Mengubahnya membutuhkan intervensi pada tingkat jaringan, bukan sekadar penyebaran informasi, untuk membangun konsensus baru yang menggeser memori kolektif lama.

Secara keseluruhan, masyarakat perkotaan di Banjarmasin mengakses informasi kebijakan pengelolaan sampah melalui ekosistem yang berlapis. Dimulai dari saluran formal seperti surat resmi, siaran pers, situs web pemerintah, dan media sosial instansi kemudian diolah menjadi pengetahuan relevan lewat sirkulasi di ruang informal: pasar, warung kopi, toko kelontong, jalan-jalan di lingkungan RT, pelataran rumah, hingga masjid. Ruang digital seperti grup WhatsApp hadir sebagai pelengkap, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada seberapa kuat komunitas menghidupkan pertukaran informasi dalam keseharian mereka.

2. Pengaruh keterbukaan informasi terhadap perubahan perilaku pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin

Hasil wawancara menggambarkan spektrum yang luas dalam cara warga merespons informasi kebijakan pengelolaan sampah. Herly menyatakan bahwa informasi yang diterimanya mendorongnya untuk mulai memilah sampah dari rumah. Pengalaman Anis menawarkan perspektif berbeda: meski informasi itu memantik keinginan menerapkan kebiasaan baru,

keterbatasan pemahaman teknis menjadi penghalang utama. Ia menuturkan,

“Iya, tapi tidak ngerti jadinya membuat kami bingung bagaimana cara yang tepat.” (Anis).

Warga lain menyoroti keadaan realitas di lapangan yang cenderung skeptis. Baginya, jangankan memilah sampah, warga yang mau membungkus sampah saja sudah patut disyukuri. Narasi para informan ini menunjukkan bahwa paparan informasi bisa menumbuhkan kesadaran dan niat, tetapi realisasi tindakan masih terganjal celah pemahaman teknis dan kesiapan fasilitas.

Pandangan warga mengenai kemudahan penerapan kebijakan juga bervariasi, tergantung pada dukungan infrastruktur yang mereka rasakan. Ahim menilai kebijakan ini pada dasarnya bisa dijalankan, asalkan ada pelatihan dan sarana yang memadai. Ia mempertanyakan bagaimana warga bisa menjalankan kebijakan ini sementara tempat sampah saja mereka tidak punya. Ia menyampaikan,

“Sebenarnya mudah, asalkan Masyarakat diberikan pelatihan dan diberikan sarananya, karena kebijakan in ikan juga mewajibkan untuk setiap rumah memiliki tempat sampah, sedangkan mereka punya tempat sampah aja tidak.” (Ahim).

Sebaliknya, Abdur berpendapat kebijakan ini sulit diterapkan karena ada ketidaksesuaian teknis antara pemilahan di tingkat rumah tangga dan sistem pengangkutan di mana sampah yang sudah dipilah dari tiap rumah pada akhirnya dicampur kembali saat diangkut. Perbedaan perspektif ini menunjukkan bahwa persepsi warga terhadap kemudahan penerapan tidak berdiri sendiri, melainkan dibentuk oleh pengamatan langsung mereka terhadap sistem pendukung di lapangan.

Terkait figur penggerak, temuan lapangan menunjukkan perbedaan yang mencolok antara wilayah. Sementara itu di wilayah Maulana, kelompok PKK berperan

sebagai penggerak aktif. Selanjutnya di lingkungan Adi, inisiatif lebih bergantung pada kesadaran individu tanpa figur sentral. Perbedaan ini mengisyaratkan adanya kesenjangan modal sosial antarwilayah yang memengaruhi kecepatan adopsi perilaku baru.

Dalam hal strategi komunikasi, para informan menawarkan beragam pendekatan. Mia menekankan perlunya sosialisasi yang lebih intensif dan inklusif untuk membangun kepercayaan. Herly, yang merasa jenuh dengan arus informasi media sosial, justru menilai komunikasi dari mulut ke mulut dalam interaksi sehari-hari lebih efektif. Jumi menambahkan pendekatan keteladanan sebagai strategi kunci di mana tindakan nyata seperti memilah sampah sendiri menurutnya lebih persuasif daripada instruksi verbal. Ridha melengkapi ini dengan menekankan pentingnya pesan yang sederhana dan konkret: bahwa kebijakan ini akan berdampak langsung secara ekonomi atau sosial bagi warga.

Satu hal yang menarik adalah antusiasme para informan untuk terlibat dalam perbaikan komunikasi. Rahmadi dan Maulana menyatakan kesiapan mereka berbagi informasi sebagai tanggung jawab moral. Habibi mengusulkan pendekatan diskusi santai sebagai cara yang lebih relevan bagi warga. Sikap ini menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki kesiapan untuk tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga agen aktif dalam mendistribusikan informasi.

Hambatan tetap ada. Rahmadi menyoroti pragmatisme warga sebagai tantangan kultural. Maulana mencatat kesenjangan literasi digital pada lansia sebagai hambatan akses. Anis menambahkan ketiadaan instruksi teknis yang jelas sebagai penyebab warga enggan mengadopsi kebiasaan baru. Usulan warga pun beragam: memperbanyak imbauan melalui media visual sederhana (Herly), memperkuat peran RT (Habibi), hingga melibatkan pemuda karang taruna (Abdur).

Dalam kerangka *diffusion of innovations* (Rogers, 1983), keterbukaan informasi berfungsi mengurangi ketidakpastian di

setiap tahap adopsi. Temuan lapangan menunjukkan bahwa ketika informasi tersedia, mudah diakses, dan diperbincangkan dalam jejaring sosial, warga lebih terbantu untuk bergerak dari tahap "tahu" menuju "percaya" hingga "mencoba." Namun proses ini tidak linear, ia dimediasi oleh siapa yang berbicara dan bagaimana pesan dibingkai.

Tahap pengetahuan, keterbukaan memperluas paparan. Saluran formal menyediakan bahan baku informasi, saluran informal mendistribusikannya hingga tingkat akar rumput. Namun, informasi yang melimpah tanpa kurasi seperti di grup WhatsApp yang terlalu ramai, berisiko meningkatkan kebingungan, bukan pemahaman, sebagaimana dicatat Bawden & Robinson (2022).

Tahap persuasi, kecenderungan warga untuk lebih meyakini figur otoritatif dibanding pesan berantai yang tidak jelas sumbernya mencerminkan dinamika kepercayaan politik yang dibahas Ardanaz et al. (2023). Ardanaz menekankan bahwa kepercayaan politik khususnya persepsi mengenai kebajikan (*benevolence*) dan kejujuran (*honesty*) pemerintah dipengaruhi oleh cara informasi mengenai inisiatif publik disampaikan. Temuan lapangan bahwa akses langsung ke figur ahli memperkuat keyakinan warga sejalan dengan argumen Ardanaz bahwa informasi yang jelas dan terperinci dapat mengurangi asimetri informasi antara pejabat publik dan warga. Ketika sumber informasi bersifat otoritatif, warga cenderung mempersepsikan pemerintah sebagai pihak yang berupaya bertindak transparan, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi kebijakan.

Sebaliknya, pesan berantai yang tidak jelas sumbernya mengandung risiko yang diidentifikasi Ardanaz et al. (2023) informasi yang bersifat umum atau sekadar prosedural sering kurang efektif mengubah persepsi warga. Kepercayaan baru berpeluang meningkat ketika warga menerima informasi mengenai hasil nyata dan keterlibatan masyarakat yang konkret. Jika figur ahli tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga memaparkan bukti keberhasilan seperti data

Dinamika akses dan pemanfaatan informasi tentang pengelolaan sampah perkotaan oleh masyarakat di Kota Banjarmasin

pengurangan sampah yang terukur, keyakinan yang terbangun akan memiliki fondasi yang lebih kokoh.

Ardanaz et al. (2023) juga menyoroti bahwa strategi informasi ini berdampak paling nyata pada kelompok warga yang awalnya skeptis terhadap pemerintah. Bagi warga Banjarmasin yang meragukan efektivitas pengelolaan sampah, kehadiran figur ahli yang memberikan akses informasi langsung dapat memperbaiki hubungan emosional dengan kebijakan. Tanpa sumber yang jelas, warga skeptis cenderung mengabaikan pesan tersebut, dan pesan berantai yang kurang valid justru memperdalam skeptisisme karena tidak ada titik informasi yang bisa diverifikasi kebenarannya.

Keterbukaan informasi berkontribusi terhadap lima atribut inovasi. Pertama, keunggulan relatif meningkat ketika informasi tidak sekadar menyuruh warga memilah sampah, tetapi juga menawarkan manfaat nyata: kesehatan lingkungan, penghematan, atau penghasilan tambahan dari bank sampah. Kedua, kompatibilitas menguat jika pesan dirangkai dengan norma setempat misalnya jam buang sampah yang disepakati RT yang oleh Sumardjo (2022) disebut sebagai prasyarat agar inovasi dapat diterima dan menjadi bagian dari kebiasaan komunitas. Ketiga, kompleksitas menurun bila keterbukaan disertai arahan praktis yang konkret seperti cara memilah, jenis bak sampah, lokasi *drop-off*. Tanpa itu, warga berhenti pada niat. Keempat, *trialability* meningkat saat warga mendapat ruang percobaan pada skala kecil, sebuah praktik yang terbukti mempercepat adopsi dalam program aksi partisipatif (Mulasari et al., 2024). Kelima, *observability* meningkat ketika hasil dapat dilihat langsung, seperti lingkungan yang lebih bersih, yang menciptakan bukti sosial dan mendorong warga lain untuk meniru.

Pada tahap implementasi, dialog di ruang informal memegang peranan penting. Percakapan antara warga berfungsi sebagai umpan balik untuk menyelesaikan kendala teknis di mana adopsi inovasi berjalan lebih lancar bila hambatan kecil dapat segera

diidentifikasi dan diatasi lewat komunikasi interpersonal (Rogers, 1983). Pada tahap konfirmasi, penguatan sosial menjadi penentu. Ketika tokoh masyarakat konsisten memberi teladan, perilaku baru berangsur menjadi norma. Keterbukaan informasi bekerja efektif hanya bila terintegrasi dengan tata kelola mikro RT/RW. Jika *frame* "sudah membayar iuran" masih dominan, informasi teknis pemilahan tidak akan banyak mengubah perilaku kecuali dibingkai ulang dengan nilai yang lebih relevan bagi warga.

Berdasarkan temuan ini, dapat diajukan argumen bahwa keterbukaan informasi memengaruhi perubahan perilaku melalui tiga mekanisme: mereduksi ketidakpastian lewat pesan yang kredibel dan konkret; memperbaiki persepsi terhadap atribut inovasi sehingga terasa lebih mudah dijalankan dan bermanfaat; serta mengaktifkan aktor lokal untuk memperkuat penerimaan inovasi. Keterbukaan informasi yang tertanam dalam jaringan sosial lokal menjadi prasyarat agar praktik pengelolaan sampah di Banjarmasin bergeser dari wacana menjadi kebiasaan.

E. KESIMPULAN

Masyarakat Kota Banjarmasin mengakses informasi kebijakan pengelolaan sampah melalui kombinasi saluran formal dan ruang informal seperti obrolan di pasar, warung kopi, toko kelontong, jalan-jalan di lingkungan RT, pelataran rumah warga, masjid hingga media sosial yang diperkuat oleh relasi kepercayaan, figur perantara lokal, dan keteladanan aktor kunci di lingkungan tempat tinggal. Saluran digital berperan sebagai pelengkap bagi kelompok yang melek teknologi, sementara efektivitas keseluruhan ditentukan oleh kapasitas komunitas dalam memproses dan memaknai informasi. Keterbukaan informasi mendorong perubahan perilaku melalui tiga mekanisme: mereduksi ketidakpastian lewat pesan yang kredibel dan konkret; memperbaiki persepsi terhadap atribut inovasi sehingga terasa lebih mudah dijalankan dan bermanfaat; serta mengaktifkan aktor lokal seperti *opinion leaders*, *early adopters*, dan organisasi warga

sebagai penguat jaring sosial dalam mensosialisasikan kebiasaan baru pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin. Berdasar temuan ini, Pemerintah Kota Banjarmasin disarankan mengoptimalkan saluran informal sebagai jalur diseminasi kebijakan yang lebih efektif, dengan mengemas informasi teknis dalam bahasa sederhana yang disampaikan oleh tokoh lokal tiap RT yang dianggap kredibel. Penelitian mendatang dapat memperluas temuan ini melalui pendekatan kuantitatif dengan sampel yang lebih luas, studi komparatif dengan wilayah yang memiliki tantangan geografis serupa, dan eksplorasi dinamika validasi informasi di ruang digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian Dibiayai oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan Skema Penelitian Dasar (Penelitian Dosen Pemula Afirmasi, Penelitian Dosen Pemula, Penelitian Pascasarjana) tahun 2025 dengan nomor kontrak: 132/C3/DT.05.00/PL/2025, 30/LL11/KM/2025, 049/UNUKASE/LPPM/Pn/VI/2025

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode penelitian kualitatif. In P. Rapanna (Ed.), *Syakir Media Press*. CV. Syakir Media Press. <https://doi.org/10.4324/9781315661063-13>
- Ardanaz, M., Otálvaro-Ramírez, S., & Scartascini, C. (2023). Does information about citizen participation initiatives increase political trust? *World Development*, 162, Article 106132. <https://doi.org/10.1016/J.WORLDDEV.2022.106132>
- Bawden, D., & Robinson, L. (2022). *Introduction to information science. Zeitschrift fur Bibliothekswesen und Bibliographie*, 69(5).

<https://doi.org/10.3196/186429502069593>

- Boltuc, P. (2022). The fourth space as reality. *Proceedings*, 81(1), Article 151. <https://doi.org/10.3390/PROCEEDINGS2022081151>
- Bruggeman, J. (2024). *Collective memory, consensus, and learning explained by social cohesion* [Preprint]. Cornell University arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2311.14386>
- Chen, R. (2024). A study applying rogers' innovation diffusion theory on the adoption process of new teaching methods in secondary education. *Research and Advances in Education*, 3(2), 6–10. <https://doi.org/10.56397/rae.2024.02.02>
- Cisek, S., Korycińska, P., & Krakowska, M. (2018). Information grounds in the eyes of the first-year information management students. *Communications in Computer and Information Science*, 810, 535–544. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74334-9_55
- Dral, G. J., Witte, P. A., & Hartmann, T. (2023). The impact of participatory decision-making on legitimacy in planning. *DisP - The Planning Review*, 59(1), 98–113. <https://doi.org/10.1080/02513625.2023.2229633>
- Emirzade, K., & Huseyinoglu, M. F. (2025). The impact of social media activities on marine and coastal litter in cyprus. *Sustainability*, 17(11). <https://doi.org/10.3390/su17114821>
- Erfani, G. (2022). Reconceptualising sense of place: Towards a conceptual framework for investigating individual-community-place interrelationships. *Journal of Planning Literature*, 37(3), 452–466. <https://doi.org/10.1177/08854122221081109>
- Etim, E., Tashi Choedron, K., & Ajai, O. (2024). Municipal solid waste management in lagos state: Expansion diffusion of awareness. *Waste*

- Management*, 190, 261–272. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2024.09.032>
- Fisher, K. E., & Naumer, C. M. (2006). Information grounds: theoretical basis and empirical findings on information flow in social settings. In A. Spink & C. Cole (Eds.), *New directions in cognitive information retrieval* (pp. 93–111). Springer. https://doi.org/10.1007/1-4020-3670-1_6
- Guo, Q., & Huang, W. (2024). Analyzing the diffusion of innovations theory. *Scientific and Social Research*, 6(12), 95–98. <https://doi.org/10.26689/ssr.v6i12.8947>
- Handayani, R. R., & Andriyus. (2024). Evaluasi tugas dinas lingkungan hidup kota dumai dalam pengelolaan sampah di kecamatan dumai barat. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 1(1), 637–642. <https://doi.org/10.25299/jmp..19644>
- Kaza, S., Yao, L. C., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2018). *What a waste 2.0: a global snapshot of solid waste management to 2050*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1329-0>
- Khoir, S., Du, J.T. & Koronios, A. (2015). Everyday information behaviour of Asian immigrants in South Australia: A mixed-methods exploration. *Information Research*, 20(3), paper 687. <http://InformationR.net/ir/20-3/paper687.html>
- Kuhlmann, J., González de Reufels, D., Schlichte, K., & Nullmeier, F. (2020). How social policy travels: A refined model of diffusion. *Global Social Policy*, 20(1), 80–96. <https://doi.org/10.1177/1468018119888443>
- Maulana, M. A., Syukri, A., Nurfaisal, M. D., & Sari, I. (2025). Optimalisasi teknologi untuk efisiensi dan transparansi dalam pengawasan pengelolaan sampah di kota serang. *Kybernology: Journal of Government Studies*, 5(1), 67–80. <https://doi.org/10.26618/KJGS.V5I1.17802>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Mulasari, S. A., Husodo, A. H., Sulistyawati, S., Sukesu, T. W., & Tentama, F. (2024). Community-driven waste management: Insights from an action research trial in yogyakarta, indonesia. *The Open Public Health Journal*, 17(1), e18749445334410. <https://doi.org/10.2174/0118749445334410241122102430>
- Nurmasari, N., Muliarto, B., & Fikri, R. (2025). Implikasi kebijakan pengurangan sampah oleh pemerintah melalui kerangka reduce, reuse, recycle: Studi pada kelompok usaha kembang setaman kota pekanbaru. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(7), 592–602. <https://doi.org/10.55681/SENTRI.V4I7.4218>
- Rogers, E. M. (1983). *Diffusion of innovations* (3rd ed.). The Free Press.
- Rusadi, S., & Setiawan, W. (2022). Optimalisasi dinas lingkungan hidup dan kebersihan dalam pengelolaan sampah di kecamatan tampan kota pekanbaru. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(1), 1–9. [https://doi.org/10.25299/jkp.2021.vol7\(1\).6446](https://doi.org/10.25299/jkp.2021.vol7(1).6446)
- Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin. (2025). *Imbas TPA Basirih ditutup, Pemko Banjarmasin tetapkan status darurat sampah: Kaji berbagai solusi dan minta warga pilah sampah dari sumber*. Humas Pemerintah Kota Banjarmasin. <https://www.banjarmasinkota.go.id/2025/02/imbas-tpa-basirih-ditutup-pemko.html>
- Shekhar, S., Garg, M. C., Verma, V. K., & Jindal, T. (2023). People's perception and the current policy gap for solid waste handling in delhi. *Asian Journal of Water*,

Environment and Pollution, 20(4), 47–59.
<https://doi.org/10.3233/AJW230051>

Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2024). *SIPSN – Sistem informasi pengelolaan sampah nasional Kem en L H K [D a t a s e t]*. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>

Sultana, P. (2023). Participatory communication and solid waste management: Siddipet 'swachh badi' efforts towards sustainable development. *International Journal of Arts, Humanities and Social Studies*, 5(1), 98–103. <https://doi.org/10.33545/26648652.2023.v5.i1b.52>

Sumardjo. (2022). *Komunikasi inovasi*. Universitas Terbuka.

Tomaszewski, L. E., Zarestky, J., & Gonzalez, E. (2020). Planning qualitative research: Design and decision making for new researchers. *International Journal of Qualitative Methods*, 19. <https://doi.org/10.1177/1609406920967174>

Yuliyani, D. N., & Indah Sari, S. N. (2023). Aspek penghambat partisipasi masyarakat lokal terhadap pengelolaan sampah kawasan wisata the new kemukus kabupaten sragen berbasis geospasial. *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)*, 5(2), 110–121. <https://doi.org/10.32585/cessj.v5i2.4539>

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1 Diagram Alir (Flowchart) Prosedur Penelitian
Sumber: Data Primer diolah tahun 2025

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Informan Penelitian

No	Nama	Pekerjaan	Peran
1	Adi	Guru SD	Berperan dalam memberikan gambaran mengenai akses informasi melalui saluran formal pemerintah dan media sosial resmi terkait kebijakan penutupan TPA Basirih
2	Jumi	<i>Freelancer</i>	Memberikan perspektif bahwa informasi lisan di lingkungan sosial lebih efektif menjangkau warga yang tidak terpapar algoritma media sosial, serta menekankan pentingnya keteladanan nyata daripada sekadar instruksi verbal
3	Herly	Pensiunan	Berperan menunjukkan proses konfirmasi informasi dari media sosial melalui sosialisasi tatap muka dan merupakan contoh warga yang terdorong mulai memilah sampah dari rumah setelah menerima informasi
4	Rahmat	Dosen	Berkontribusi dalam menjelaskan penggunaan bauran media sosial dan interaksi fisik untuk memahami kebijakan pengelolaan sampah
5	Mia	Kader Kelurahan	Menekankan pentingnya legitimasi institusional (logo/stempel resmi) untuk kepastian hukum, aktif menggunakan grup WhatsApp warga, dan menyoroti bahwa kredibilitas figur penyampai pesan sangat menentukan kepercayaan masyarakat
6	Herman	Karyawan Swasta	Memberikan pandangan kritis bahwa informasi yang bersumber langsung dari sesama warga sering kali dianggap lebih jujur dan dapat dipercaya dibandingkan pernyataan otoritas resmi
7	Ridha	Anggota Karang Taruna	Mengungkapkan bagaimana isu sampah didiskusikan secara organik dalam ruang informal warga dan menyarankan agar pesan kebijakan dibuat sederhana serta konkret mengenai dampak ekonomi atau sosialnya
8	Junai	Wiraswasta	Memberikan masukan mengenai ketidakefektifan infrastruktur digital (grup WhatsApp RT) jika tidak dikelola secara optimal sebagai ruang diskusi
9	Abdur	Mahasiswa	Memberikan penjelasan mengenai ketidaksesuaian antara pemilahan sampah di rumah yang akhirnya tercampur kembali saat diangkut
10	Maulana	Wiraswasta	Menyatakan kesediaan untuk menjadi agen informasi secara moral, namun mencatat bahwa literasi digital lansia tetap menjadi hambatan akses
11	Habibi	Wiraswasta	Mengusulkan metode komunikasi pemerintah melalui pendekatan diskusi santai yang dianggap lebih relevan dan mudah diterima oleh karakter masyarakat setempat
12	Anis	Wiraswasta	Menyampaikan aspirasi mengenai perlunya instruksi teknis yang jelas karena keterbatasan pemahaman membuat warga bingung untuk mempraktikkan pemilahan sampah meskipun sudah memiliki niat
13	Zainal	Wiraswasta	Menunjukkan fenomena <i>information overload</i> , di mana tumpukan pesan digital yang terlalu banyak justru membuat warga mengabaikan informasi kebijakan yang penting
14	Wahab	Ketua LPMK	Menyoroti tantangan kesenjangan literasi digital antar-generasi yang menghambat proses translasi informasi kebijakan menjadi tindakan nyata
15	Ahim	Wiraswasta	Berperan memberikan wawasan bahwa kebijakan pemerintah pada dasarnya dapat diterima dan diterapkan oleh masyarakat asalkan didukung oleh pelatihan teknis dan penyediaan fasilitas yang memadai

Sumber: Data Primer diolah tahun 2025